

DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM : PENDEKATAN MODEL FISCHER DI KOTA SEMARANG



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DESKY MELATI PUTRI ANJANI

NIM. 12020115120005

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Desky Melati Putri Anjani

Nomor Induk Mahasiswa : 12020115120005

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM: PENDEKATAN MODEL FISCHER DI KOTA SEMARANG

Dosen Pembimbing : Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA

Semarang, 1 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

(Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, SE., MA.)

NIP. 197804022006041016

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Desky Melati Putri Anjani

Nomor Induk Mahasiswa : 12020115120005

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM: PENDEKATAN
MODEL FISCHER DI KOTA SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 14 Agustus 2019

Tim Penguji

1. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA (.....)
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D (.....)
3. Banatul Hayati, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,
Wakil Dekan I

(Firmansyah, SE., M.Si., Ph.D)

NIP.197404271999031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Desky Melati Putri Anjani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Determinan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Model Fischer di Kota Semarang” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

(Desky Melati Putri Anjani)

NIM :12020115120005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan jadi seperti telur, ketika terjatuh dia akan pecah, tetapi jadilah seperti bola bekel, semakin tinggi bantingannya, semakin tinggi lentingannya.” – *Unknown*

“I’d rather bend than break.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayah dan Bunda

ABSTRAK

Salah satu insentif yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak UMKM adalah dicabutnya PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018. Penurunan tarif 1% menjadi 0,5% dapat menjadi cerminan bahwa pemerintah tengah mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menggunakan pendekatan model kepatuhan pajak Fischer di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dan *gender*, tingkat pendidikan, efektivitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi dan pinalti, tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, pengaruh teman komunitas bisnis, kecerdasan emosional, norma sosial, nilai etis, peluang untuk tidak patuh, dan tingkat pendapatan sebagai variabel independen. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang tergolong wajib pajak patuh formal. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel independen yang berpengaruh secara signifikan yakni tingkat pendidikan, efektivitas sistem perpajakan, tarif pajak, pengaruh teman komunitas bisnis, kecerdasan emosional, nilai etis dan tingkat pendapatan. (2) Sedangkan, variabel *gender*, kemungkinan deteksi dan pinalti, keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan peluang untuk tidak patuh tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pajak UMKM, model kepatuhan pajak Fischer, *Gender*, Tingkat Pendidikan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemungkinan Deteksi dan Pinalti, Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Pengaruh Teman Komunitas Bisnis, Kecerdasan Emosional, Norma Sosial, Nilai Etis, Peluang untuk Tidak Patuh, Tingkat Pendapatan.

ABSTRACT

One of the incentive policy that is implemented by goverment towards Micro, Small and Medium Enterprises taxpayers is the revocation of Goverment Regulation (PP) No. 46 Year 2013 become Goverment Regulation (PP) No. 23 Year 2018. The decreasing tax rates from 1% to 0.5% can be seen as a reflection that goverment is trying to encourage the Micro, Small and Medium Enterprises taxpayers to improve their tax compliance in fulfilling tax obligations.

The aim of this research is to examine the factors that influence tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises taxpayers using Fischer's tax compliance model approach in Semarang city. This research uses tax compliance as the dependent variable and gender, education, complexity of the tax system, probability of detection and penalties, tax rates, fairness of tax system, influence of peer in business communities, emotional intelligence, social norms, ethical values, noncompliance opportunity and income level as the independent variables. The primary data was collected by using questionnaire collection method towards 100 respondents who are the owner of Micro, Small and Medium Enterprises and are included as the formal compliance taxpayer. Data was analyzed with a multiplier linear regression method.

The results of this research indicated that: (1) The variables of education, complexity of the tax system, tax rates, influence of peer in business communities, emotional intelligence, ethical values and income level are significantly influence the tax compliance. (2) Meanwhile, variables gender, probability of detection and penalties, fairness in tax system, social norms, and noncompliance opportunity are insignificantly in influencing the tax compliance.

Key Words: *Tax Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises Tax, Fischer's Tax Compliance, Gender, Education, Complexity of the Tax System, Probability of Detection and Penalties, Tax Rates, Fairness of Tax System, Influence of Peer in Business Communities, Emotional Intelligence, Social Norms, Ethical Values, Noncompliance Opportunity and Income Level*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Model Fischer di Kota Semarang”. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Akhmad Syakir Kurnia, SE., MSi., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Prof.Drs.H. Waridin, MS., Ph.D selaku dosen wali atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini kepada penulis selama menempuh studi.
4. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, SE, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan dengan penuh sabar kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan para responden yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memperoleh ketersediaan data yang dibutuhkan.
7. Ayah dan Bunda yang selalu mendoakan dan memberikan semangat juga motivasi tanpa henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh.
8. Aisyah Arifin yang selalu memberikan motivasi, saran dan canda tawanya selama sebelum dan ketika proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, Ipin.
9. Fadlilaili Whahda Sabila yang selalu menjadi teman baik dan memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan diskusi sehat selama penyusunan skripsi ini juga sejak awal menjadi mahasiswa baru. Terima kasih, Laili.
10. Putri Annisa Noviani yang tidak pernah bosan untuk berbagi cerita dan pengalaman lucu serta selalu menemani penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih, Biru.
11. Syahid Izzulhaq atas ilmu dan diskusi sehat juga *insight* yang selalu diberikan selama penyusunan proses skripsi ini. Terima kasih, It.
12. Ghina Mufida dan Bunga Zharfa Aulia, Dinda Amartya Martin yang selalu menjadi tempat berbagi cerita gelayut dan juga canda tawa, serta keceriaan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih, Broks.

13. Terima kasih kepada Fuad dan Fajar untuk yang selalu ada seperti tombol darurat dan juga Dhea, Ariq, Beni, Widi, Alan, Eko, Yaya, Indah, Dania, Afidatun dan Umayya sebagai teman main melewati dunia perkuliahan sejak jaman maba.
14. Rombongan Lenong Susenlo II. Intan, Winda, Ale, Ipin, Biru, Bunga dan Abay yang telah berbagi waktu untuk sekedar berbagi cerita, keceriaan dan makan bersama.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Departemen IESP dan PSDM untuk inspirasi dan pengalaman serta motivasinya.
16. Teman-teman IESP 2015 atas kebersamaan dan kerjasama dan pembelajarannya.
17. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung dan belum bisa disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa sampai dengan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menjadikan skripsi ini lebih baik.

Semarang, 1 Agustus 2019

Penulis,

Desky Melati Putri Anjani

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	20
1.4. Sistematika Penelitian	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Pajak.....	23
2.1.2. Kepatuhan Pajak	33
2.1.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah.....	37
2.1.4 Hubungan antar Variabel	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	51
2.3 Kerangka Pemikiran	58
2.4 Hipotesis.....	61
BAB III	63
METODOLOGI PENELITIAN.....	63
3.1 Variabel Penelitian	63
3.1.1 Definisi Operasional Variabel	64

3.2 Populasi dan Penentuan Sample	75
3.3 Jenis dan Sumber Data	76
3.4 Metode Pengumpulan Data	77
3.5 Metode Analisis Data	78
3.5.1 Uji Validitas dan Realibilitas	79
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	81
3.5.4 Uji Hipotesis dan Signifikansi	82
BAB IV	85
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	85
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	85
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang.....	85
4.1.2 Karakteristik Responden.....	86
4.2 Analisis Data	91
4.2.1 Uji Validitas.....	91
4.2.2 Uji Reliabilitas	93
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	94
4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda	97
4.2.5 Pengujian Hipotesis	98
BAB V.....	114
PENUTUP	114
5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Keterbatasan	115
5.3. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Penerimaan Dalam Negeri dan Kontribusinya (Miliar Rupiah)	2
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak dalam Negeri dan Realiasi Penerimaan Pajak dalam Negeri (Miliar Rupiah).....	3
Tabel 1.3 Realiasi Penerimaan PPh, Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Kontribusi PPh (Miliar Rupiah).....	4
Tabel 1.4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di Kota Semarang 2014-2018)	8
Tabel 1.5 Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Menurut Jenis Pajak, 2013 – 2016)	10
Tabel 1.6 Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah per Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016)	11
Tabel 1.7 Jumlah, Omset dan Aset UMKM di Kota Semarang hingga tahun 2018.....	12
Tabel 1.8 Pencapaian Penerimaan Pajak di Kota Semarang tahun 2017.....	13
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah.....	37
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kepatuhan.....	63
Tabel 3.2 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel <i>Gender</i>	64
Tabel 3.3 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 3.4 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Efektivitas Sistem Perpajakan.....	66
Tabel 3.5 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kemungkinan Deteksi dan Pinalti.....	67
Tabel 3.6 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Tarif Pajak.....	68
Tabel 3.7 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Keadilan Sistem Perpajakan.....	69
Tabel 3.8 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Pengaruh Teman Komunitas Bisnis.....	70

Tabel 3.9 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kecerdasan Emosional...	70
Tabel 3.10 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Norma Sosial.....	71
Tabel 3.11 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Nilai Etis.....	72
Tabel 3.12 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Peluang untuk Tidak Patuh.....	73
Tabel 3.13 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Tingkat Pendapatan....	73
Tabel 4.1 Rincian Sebaran Kuesioner.....	85
Tabel 4. 2 Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Status Perkawinan.....	86
Tabel 4.3 Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Menurut Agama, Tingkat Pendidikan, dan Status Masyarakat.....	87
Tabel 4.4 Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Menurut Bidang Jenis Usaha.....	88
Tabel 4.5 Karakteristik Sosial Ekonomi Responden Menurut Jumlah Karyawan, Omset, Pendapatan dan Lama Usaha.....	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	90
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	92
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	93
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	94
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas (Glesjer).....	95
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	96
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	98
Tabel 4.13 Hasil uji Koefisien Determinasi (R ²).....	99
Tabel 4.14 Hasil Uji T.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri (Miliar Rupiah).....	2
Gambar 1.2 Tax Rasio 2013-2016)	5
Gambar 1.3 WP Terdaftar, WP Terdaftar Wajib SPT dan Realisasi SPT di Kota Semarang tahun 2014-2018)	7
Gambar 2.1 Model Kepatuhan Pajak Fischer et al (1992).....	36
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis)	59
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Semarang)	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Responden.....	117
Lampiran B Data Jawaban Responden.....	128
Lampiran C Output SPSS.....	144
Lampiran D Kuesioner Penelitian.....	149
Lampiran E Dokumentasi Penelitian.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

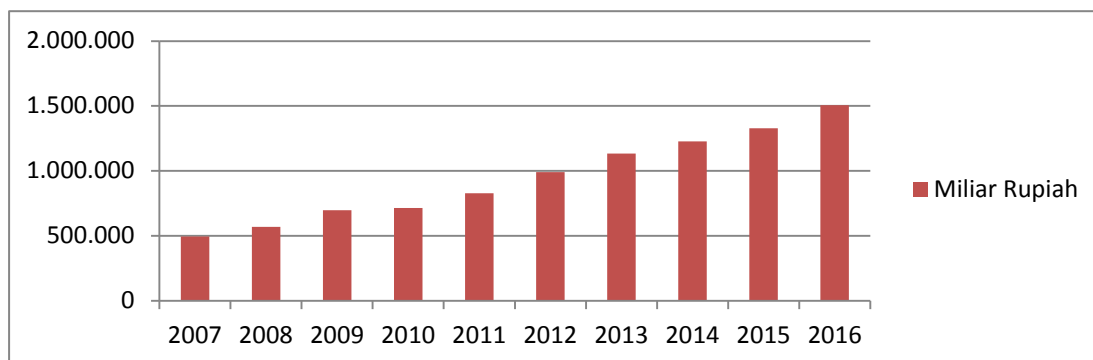
Salah satu sumber penerimaan pendapatan negara dalam negeri yang tertuang dalam postur APBN ialah berasal dari penerimaan perpajakan. Pemungutan pajak di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Menurut Waluyo (2011) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang untuk membayar sejumlah uang untuk kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri, masih terus dilakukan perbaikan hingga saat ini. Perbaikan sistem perpajakan atau yang sering kali disebut sebagai reformasi sistem perpajakan telah berlangsung sejak tahun 1983 dan masih diperbaharui hingga sekarang. Reformasi perpajakan adalah pembenahan terkait administrasi sistem perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Reformasi perpajakan sendiri mempunyai peran yang sangat penting, salah satunya adalah perbaharuan sistem yang dianut di tiap tahunnya. Adanya reformasi sistem perpajakan selain untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, reformasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Gambar 1.1. menunjukkan penerimaan pajak dalam negeri dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat yang dipengaruhi oleh reformasi perpajakan tiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 2007 hingga

tahun 2016 menandakan bahwa pajak di Indonesia sangatlah berperan penting terhadap perekonomian.

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Keterangan: dalam Miliar Rupiah

Selain itu, peranan dari sumber penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan dalam negeri memiliki kontribusi yang tinggi setiap tahunnya. Dilihat dari Tabel 1.1., setiap tahunnya penerimaan pajak dalam negeri memiliki kontribusi yang cenderung meningkat setiap tahunnya yang menandakan bahwa penerimaan pajak dalam negeri berperan sangat penting dalam perekonomian.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Penerimaan Dalam Negeri dan Kontribusinya

Tahun	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	Penerimaan Dalam Negeri	Kontribusi %
2011	827.246	1.101.162	75.12%
2012	989.637	1.310.562	75.51%
2013	1.134.289	1.525.189	74.37%
2014	1.226.474	1.665.781	73.63%
2015	1.328.488	1.790.333	74.20%
2016	1.506.578	1.820.514	82.76%
2017	1.464.796	1.748.910	83.75%

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Keterangan: dalam Miliar Rupiah

Di sisi lain, jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan dari pajak harus direalisasikan dengan optimal demi berlangsungnya pembangunan di Indonesia, adapun yang terjadi di Indonesia, pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan pajak dalam negeri belum sepenuhnya optimal, pada tahun 2009, realisasi dari penerimaan pajak dalam negeri hanya mencapai 86%. Walaupun ada kenaikan dari penerimaan pajak dalam negeri tiap tahunnya, tetapi hal ini tidak tidak diiringi dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tiap tahunnya. Hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak dalam Negeri dan Realiasi Penerimaan Pajak dalam Negeri

Tahun	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	Realiasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
2007	494.592	470.052
2008	569.971	622.359
2009	697.347	601.252
2010	715.535	694.392
2011	827.246	819.752
2012	989.637	930.862
2013	1.134.289	1.029.850
2014	1.226.474	1.103.218
2015	1.328.488	1.205.479
2016	1.506.578	1.249.500
2017	1.464.796	1.436.731

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Keterangan: dalam Miliar Rupiah

Selain sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak digunakan untuk mendukung jalannya perekonomian di Indonesia. Salah satu komponen pajak yang mempunyai kontribusi tinggi dalam penerimaan perpajakan ialah Pajak

Penghasilan (PPh). Dilihat dari Tabel 1.3, realisasi dari penerimaan PPh cenderung meningkat setiap tahunnya, selain itu kontribusi dari penerimaan pajak PPh terhadap penerimaan pajak dalam negeri cenderung berkisar di angka lima puluh persen. Hal tersebut menandakan bahwa penerimaan pajak penghasilan sangat berkontribusi cukup tinggi dan dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak dalam negeri bergantung pada penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 1.3
Realiasi Penerimaan PPh, Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Kontribusi PPh

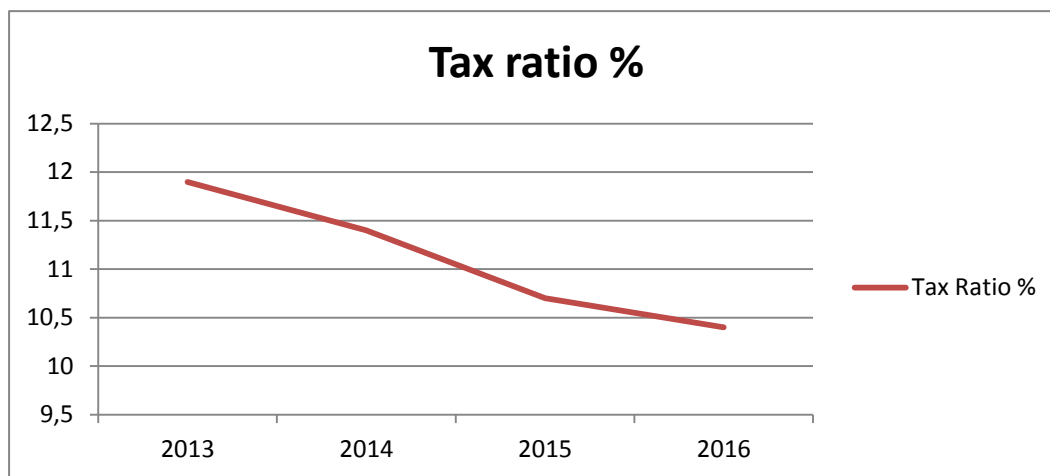
Tahun	Realisasi Penerimaan PPh	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri	Kontribusi %
2007	238.431	470.052	50,72%
2008	327.498	622.359	52,62%
2009	317.615	601.252	52,83%
2010	357.045	694.392	51,42%
2011	431.122	819.752	52,59%
2012	465.070	930.862	49,96%
2013	506.443	1.029.850	49,18%
2014	546.181	1.103.218	49,51%
2015	602.308	1.205.479	49,96%
2016	657.163	1.249.500	52,59%
2017	783.970	1.436.731	54,57%

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Keterangan: dalam Miliar Rupiah

Namun, adanya kenaikan dari pajak penghasilan tiap tahunnya tidak diimbangi dengan *tax ratio* pajaknya. Menurut Simanjutak dan Mukhlis (2012) *tax ratio* digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diterima oleh negara dengan jumlah PDB suatu negara.

Gambar 1.2
Tax Rasio 2013-2016



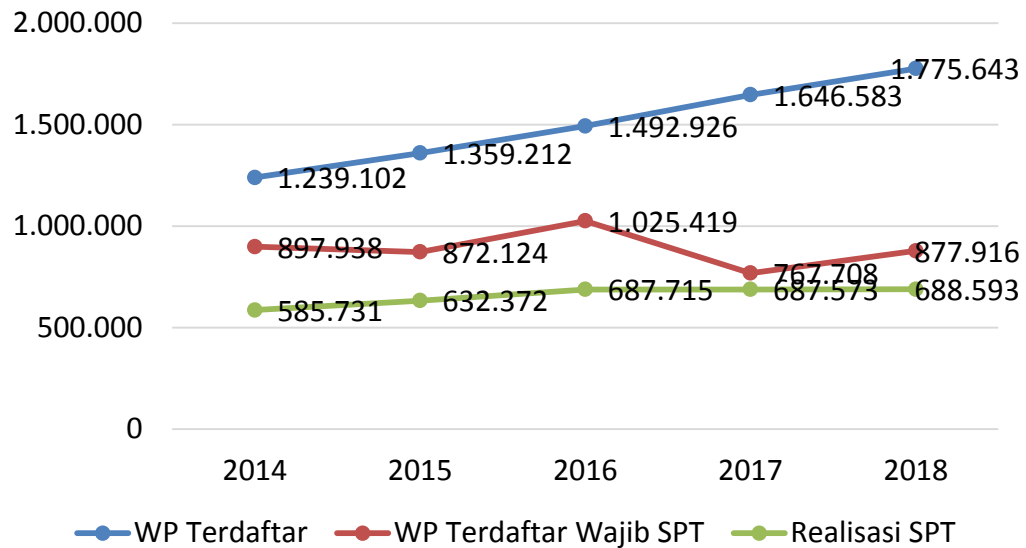
Sumber: Kementerian Keuangan

Pada Gambar 1.2 menunjukkan tax rasio dalam arti sempit dari tahun 2013 sampai 2016 dilihat dari tax rasio dalam arti sempit yaitu tanpa penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba yang mempunyai tren yang cenderung menurun hingga tahun 2016. Pada tahun 2013 sendiri, rasio penerimaan pajak terhadap PDB ialah sebesar 11,9% dan menurun hingga 11,4 hingga tahun 2014. Adapun pada tahun 2016, penerimaan pajak terhadap PDB hanya mencapai 10,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan *tax ratio* berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam memungut pajak masih belum efektif dan efisien sehingga timbulnya persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan dalam penyampaian pajak (*tax compliance*). Masih rendahnya kepatuhan pajak, menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah selalu melakukan reformasi perpajakan di Indonesia.

Reformasi perpajakan berhubungan erat dengan sistem dan regulasi perpajakan yang diberlakukan. Langkah yang dilakukan pemerintah demi mengoptimalkan dan memperbaharui reformasi perpajakan adalah dengan merubah regulasi yang telah berlaku. Salah satu perubahan regulasi yang diharapkan mendapatkan respon dari wajib pajak adalah regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia yakni perubahan regulasi Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018.

Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1%. Sedangkan perubahan yang dilakukan dalam PP 23 tahun 2018 adalah tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% diubah menjadi 0,5% untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Perubahan regulasi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah masih turut memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun disisi lain juga dapat diartikan sebagai cerminan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah sedangkan penerimaan perpajakan dan *tax ratio* bergantung pada basis pajak yang ada di Indonesia.

Gambar 1.3
WP Terdaftar, WP Terdaftar Wajib SPT dan Realisasi SPT di Kota Semarang tahun 2014-2018



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan Gambar 1.3, Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki wajib pajak terdaftar yang selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, wajib pajak terdaftar setiap tahunnya yang cenderung meningkat tersebut, berbeda halnya dengan wajib pajak terdaftar wajib SPT yang cenderung mempunyai pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Wajib pajak terdaftar wajib SPT di tahun 2016 menurun cukup drastis dari tahun 2015. Di sisi lain, realisasi SPT tiap tahunnya cenderung meningkat namun realisasi tersebut tidak pernah mencapai angka 100% atau dapat dikatakan realisasi SPT tidak pernah tersealisasi hingga 100%. Hal ini mencerminkan bahwa adanya ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak kota Semarang.

Tabel 1.4
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di Kota Semarang 2014-2018

Keterangan	2015	2016	2017	2018	Rata-rata pertumbuhan
1. WP Terdaftar	1.359.212	1.492.926	1.646.583	1.775.643	8.460
Badan	95.751	109.800	121.764	129.627	105.602
OP Non Karyawan	230.536	253.922	292.225	322.369	23.373
OP Karyawan	1.032.925	1.129.204	1.232.594	1.323.647	82.229
2. WP Terdaftar Wajib SPT	872.124	1.025.419	767.708	877.916	4.944
Badan	55.717	62.902	65.470	76.101	(1.357)
OP Non Karyawan	98.520	115.655	105.728	141.646	5.288
OP Karyawan	717.887	846.862	596.510	660.169	(6.645)
3. Realisasi SPT	632.372	687.715	687.573	688.593	3.967
Badan	37.291	40.950	45.629	48.229	17.091
OP Non Karyawan	50.060	57.896	71.129	102.184	13.062
OP Karyawan	545.021	588.869	570.815	538.180	16.862
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)	72.51%	67.07%	89.56%	78.43%	1.62%
Badan	66.93%	65.10%	69.69%	63.37%	2.25%
OP Non Karyawan	50.81%	50.06%	67.28%	72.14%	8.03%
OP Karyawan	75.92%	69.54%	95.69%	81.52%	3.21%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah, 2019

Di sisi lain, berdasarkan Tabel 1.4., rata-rata pertumbuhan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak di Kota Semarang hanya sebesar 2,25% untuk wajib pajak badan dan 8,03% untuk wajib pajak orang pribadi. Pada wajib

pajak orang pribadi non karyawan, rasio kepatuhan pajak cenderung meningkat setiap tahunnya namun tidak pernah melebihi rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal ini dapat menjadi cerminan bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan cenderung lebih kurang patuh dibandingkan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam hal penyampaian SPT.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan penerimaan pajaknya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan dan *tax ratio* adalah dengan memperluas basis pajak. Perluasan basis pajak dapat dilakukan dengan menaikkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak terdaftar di kota Semarang cenderung didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dibandingkan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan, hal ini menandakan masih sangat diperlukannya penambahan basis pajak yang juga berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 1.5, realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Tengah I menurut jenis pajak dapat diketahui bahwa PPh Final yang didalamnya memuat PP 23 Tahun 2018 mempunyai realisasi penerimaan pajak yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, pajak PPh Final mempunyai penurunan realisasi penerimaan yang terjadi di tahun 2016. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan PPh Pasal 25, PPh Final (UMKM) dapat dinilai mempunyai potensi untuk ditingkatkan basis pajaknya. Salah satu kota yang berpotensi untuk ditingkatkan basis pajaknya ialah kota Semarang dengan melihat potensi yang dimiliki oleh kota Semarang.

Tabel 1.5
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Menurut Jenis Pajak, 2013 – 2016

Jenis Pajak	2013	2014	2015	2016
A. PPh Non Migas	7.130.274.133.538	9.323.262.579.305	11.122.114.132.512	18.197.156.910.455
PPh Pasal 21	2.208.276.901.689	2.699.450.542.273	3.000.972.717.439	2.881.470.176.828
PPh Pasal 22	211.163.046.686	268.112.727.230	308.248.889.648	309.440.564.471
PPh Pasal 22 Impor	403.284.860.411	746.117.092.473	803.749.901.968	729.062.695.672
PPh Pasal 23	262.593.191.571	288.578.418.720	321.573.915.059	386.730.718.893
PPh Pasal 25/29 OP	292.355.874.654	353.509.556.629	516.422.133.930	233.599.971.239
PPh Pasal 25/29 Badan	1.975.838.941.285	2.844.659.001.866	3.245.434.169.525	3.331.243.322.998
PPh Pasal 26	44.644.693.003	62.353.494.073	63.823.185.157	78.802.847.485
PPh Final	1.732.053.535.710	2.060.287.184.094	2.861.586.949.603	2.338.655.171.945
PPh Non Migas Lainnya	17.973.003	127.066.102	254.929.165	7.908.073.686.755
Fiskal Luar Negeri	45.115.526	67.495.845	47.341.018	77.754.169

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2016, berdasarkan Tabel 1.6., kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, mempunyai pendapatan asli daerah yang sangat tinggi dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kota Semarang juga sebagai salah satu pusat perekonomian provinsi Jawa Tengah dan mempunyai program prioritas dalam menggenjot perdagangan dan jasa.

Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat dilihat potensi yang besar terhadap penduduk kota Semarang untuk ditingkatkan basis pajaknya melalui peningkatan wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhan pajaknya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga yang pada nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Semarang.

Tabel 1.6
Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah per Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

DAERAH	PAD
Kota Magelang	178.121.571.000
Kota Pekalongan	160.542.382.000
Kota Salatiga	146.651.969.000
Kota Semarang	1.232.373.211.000
Kota Tegal	258.668.643.000

Sumber : DJPK. Kementerian Keuangan. 2017

Potensi penerimaan pajak kota Semarang juga bergantung dari aktivitas perekonomian di kota Semarang. Aktivitas perekonomian di kota Semarang sangatlah beragam mengingat kota Semarang adalah ibukota Jawa Tengah. Aktivitas perekonomian kota Semarang sangat berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di kota Semarang. Total aset yang dimiliki dari adanya usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang adalah sebesar 158.711.784.934 rupiah dan total omset hingga tahun 2018 adalah sebesar 409.883.835.427 rupiah. Dengan melihat potensi adanya total aset dan omset yang dimiliki oleh kota Semarang yang terbilang cukup besar, dengan memperhitungkan omset dan aset juga total jumlah usaha di kota Semarang, adanya usaha mikro kecil dan menengah seharusnya dapat menjadi salah satu potensi kota Semarang untuk digali lebih dalam lagi terkait pajak usaha mikro

kecil dan menengahnya yang dapat memberikan kontribusi lebih terkait penerimaan pajak di kota Semarang.

Tabel 1.7
Jumlah, Omset dan Aset UMKM di Kota Semarang hingga tahun 2018

Kecamatan	Total Jumlah Usaha	Omset	Aset
Banyumanik	194	19.579.986.000	7.552.545.000
Candisari	212	11.432.802.000	4.302.250.000
Gajahmungkur	94	6.875.680.000	6.920.090.000
Gayamsari	245	19.753.732.000	4.272.425.000
Genuk	148	22.545.560.000	6.818.575.000
Gunungpati	127	12.218.370.000	4.423.800.000
Mijen	196	17.658.248.002	4.215.733.021
Ngaliyan	120	15.530.760.001	6.151.150.000
Pedurungan	339	41.337.592.565	19.703.919.562
Semarang Barat	297	25.937.190.161	14.894.971.068
Semarang Selatan	147	13.780.680.000	4.872.850.000
Semarang Tengah	564	77.222.635.600	45.151.812.000
Semarang Timur	137	22.924.000.000	5.099.590.000
Semarang Utara	660	74.540.740.000	14.682.136.300
Tembalang	295	24.942.649.098	7.939.437.983
Tugu	64	3.603.210.000	1.710.500.000
Total	3.839	409.883.835.427	158.711.784.934

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Adanya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang, tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Semarang. Berdasarkan Aplikasi Internal DJP Kanwil I Jawa Tengah, di tahun 2018 dari 7 kecamatan di Kota Semarang yaitu Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Tengah Satu, Semarang Tengah Dua, Semarang Candisari, dan Semarang Gayamsari, terdapat kecamatan yang memiliki rasio kepatuhan tidak mencapai 100%, yaitu Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Candisari dan Semarang Gayamsari. Selain itu, pada tahun 2017 pencapaian penerimaan

pajak dari tiap 7 kecamatan di Kota Semarang tersebut tidak mencapai 100%. Hal ini menandakan diperlukannya perhatian yang lebih mendalam terkait kepatuhan pajak di kota Semarang demi meningkatkan penerimaan pajak di kota Semarang.

Tabel 1.8
Pencapaian Penerimaan Pajak di Kota Semarang tahun 2017

Keterangan	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (Target : Realisasi)
Semarang Barat	2.047.350.163.000	1.628.229.719.553	79.53%
Semarang Timur	986.759.649.000	876.911.723.254	88.87%
Semarang Selatan	391.338.019.000	313.827.107.371	80.19%
Semarang Tengah Satu	337.696.377.000	305.974.545.240	90.61%
Semarang Tengah Dua	587.996.415.000	465.658.991.852	79.19%
Semarang Candisari	1.155.457.005.000	921.042.706.472	79.71%
Semarang Gayamsari	856.041.753.000	738.476.982.255	86.27%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh kota Semarang yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, dapat meningkatkan penerimaan perpajakan di kota Semarang. Usaha mikro kecil dan menengah masuk kedalam kategori Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 yang seringkali dianggap sebagai pajak UMKM. Namun dalam meningkatkan basis pajak UMKM juga harus memperhatikan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Permasalahan kepatuhan pajak sedari dulu sudah menjadi perhatian dalam dunia penelitian. Sesuai dengan teori yang ada bahwa dalam meningkatkan kepatuhan pajak selalu dilatarbelakangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kepatuhan pajak sangat berperan penting terhadap

keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak di dunia perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan pajak seseorang tidak hanya didasari oleh diri sendiri, melainkan juga faktor psikologis, lingkungan dan sistem perpajakan yang diterapkan. Menurut model kepatuhan pajak Fischer (1992), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu variabel *gender* dan tingkat pendidikan wajib pajak yang masuk ke dalam kategori demografis. Salah satu penelitian yang mendukung variabel *gender* adalah penelitian Debbianita dan Carolina (2013) yang menyatakan bahwa *gender* memengaruhi kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, penelitian yang mendukung variabel pendidikan adalah penelitian Jackson dan Milliron (1986) dalam Richardson, Sawyer (2001) yaitu variabel pendidikan dipandang sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakannya.

Fischer menganggap bahwa kepatuhan pajak seseorang juga tidak lepas dari sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak. Maka dari itu, Fischer menganggap bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang adalah efektivitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi dan pinalti dan tarif pajak. Efektivitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi dan pinalti, dan tarif pajak masuk ke dalam kategori sistem dan struktur perpajakan dalam model kepatuhan pajak Fischer. Menurut Chau dan Leung (2009), sistem / struktur perpajakan yang kurang berkembang adalah salah satu penyebab utama fenomena kepatuhan pajak yang rendah. Richardson (2006) menemukan bahwa kompleks hukum pajak yang diberlakukan mempunyai pengaruh yang signifikan

terkait dengan penggelapan pajak. Selain itu, Jatmiko (2006) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mempunyai persepsi bahwa sanksi yang diberlakukan akan membuat wajib pajak lebih merugi. Alm (1991) menuturkan bahwa dengan meningkatkan audit akan meningkatkan kepatuhan pajak, karena audit merupakan salah satu langkah detektif efektif yang digunakan oleh otoritas pajak.

Fischer juga menjelaskan dalam model kepatuhan pajaknya, yaitu sikap dan persepsi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Kategori sikap dan persepsi dijelaskan dengan variabel keadilan sistem perpajakan dan pengaruh teman komunitas bisnis dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Penelitian dari Abdulhadi Khasawneh et. Al (2008) menyimpulkan bahwa keadilan pajak penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pendapatan, tetapi keadilan pajak saja tidak menginterpretasikan semua perubahan yang terjadi dalam masalah kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengaruh teman komunitas bisnis yang tercermin dari ekspektasi seseorang terkait dengan persetujuan atau ketidaksetujuan atas perilaku ketidakpatuhan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak menurut model kepatuhan pajak Fischer adalah kategori peluang untuk tidak patuh dengan variabel tingkat pendapatan. Namun, peluang untuk tidak patuh itu sendiri dapat menjadi salah satu pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak selain tingkat pendapatan. Ritsema et al. (2003) menemukan bahwa tingkat pendapatan berhubungan positif dengan pajak yang terhutang. Selain itu, Jackson, Jones

(1985) dalam Hai (2011) menganggap bahwa penghindaran pajak dan ketidakpatuhan pajak merupakan masalah serius.

Lawan, Salisu (2017) berpendapat bahwa diperlukannya perluasan model terkait model kepatuhan pajak Fischer (1992). Lawan, Salisu (2017) menuturkan bahwa terdapat pengaruh dari dalam diri sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak menurut Lawan, Salisu (2017) adalah kecerdasan emosional. Menurut Lawan, Salisu (2017), perluasan yang diusulkan terkait model kepatuhan pajak Fischer secara teoritis akan menambah literatur positif terkait kepatuhan pajak, karena akan dengan jelas menjelaskan beberapa perilaku yang melekat pada wajib pajak. Kecerdasan emosional sendiri, mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang melalui cara wajib pajak dalam mengelola emosi dan memotivasi diri sendiri.

Selain itu, Chau, Leung (2009) juga berpendapat diperlukannya perluasan model terhadap model kepatuhan pajak Fischer (1992) yang dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak seseorang. Chau, Leung (2009) menuturkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah norma sosial dan nilai etis yang dikategorikan sebagai kategori budaya. Studi yang dilakukan oleh Chan et al. (2000) menunjukkan bahwa budaya wajib pajak berdampak pada upaya kepatuhan wajib pajak. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 12 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel *gender*, tingkat pendidikan, efektivitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi dan pinalti, tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, pengaruh teman komunitas bisnis, kecerdasan emosional, norma sosial, nilai etis, peluang untuk tidak patuh, dan tingkat pendapatan adalah sebagai

variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun teori yang mendasari dalam pengambilan variabel ialah teori kepatuhan pajak dan model kepatuhan pajak Fischer (1992) dengan menambahkan modifikasi penambahan variabel Lawan, Salisu (2017) dan Chau, Leung (2009) dalam model kepatuhan pajak Fischer (1992). Variabel-variabel tersebut diatas diteliti untuk meihat seberapa besar pengaruh secara simultan dan masing-masing variabel terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan studi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan basis pajak UMKM di kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM sebagai objek penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, yakni wajib pajak orang pribadi dan badan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan perpajakan, khususnya pajak dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar dalam APBN. Pajak dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar adalah pajak penghasilan. Namun, dalam dinamikanya, penerimaan pajak penghasilan sendiri juga dipengaruhi oleh basis pajaknya. Salah satu permasalahan basis pajak ialah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berhubungan erat dengan regulasi yang berlaku. Pajak UMKM masuk dalam kategori pajak penghasilan. Adanya insentif dari pemerintah terhadap wajib pajak UMKM, yang dicerminkan oleh perubahan PP

46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018, dimana salah satu instrumen yang berubah ialah adanya penurunan tarif 1% menjadi 0,5% yang dapat menjadi cerminan bahwa pemerintah tengah mendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain, perubahan regulasi tersebut juga mengindikasikan adanya tingkat kepatuhan yang rendah terhadap wajib pajak UMKM. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh kota Semarang, jumlah UMKM yang ada seharusnya dapat menjadi potensi untuk meningkatkan basis pajak UMKM kota Semarang. Namun, permasalahan basis pajak selalu terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang ada. Untuk menelusuri lebih jauh terkait kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang, perlu untuk meneliti determinan yang melatarbelakangi kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang sehingga dapat meningkatkan basis pajak UMKM di kota Semarang.

Menurut model kepatuhan pajak Fischer (1992) dan perluasan model kepatuhan pajak Fischer dari Lawan, Salisu (2017) dan Chau, Leung (2009), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh *gender*, tingkat pendidikan, efektivitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi dan pinalti, tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, pengaruh teman komunitas bisnis, kecerdasan emosional, norma sosial, nilai etis, peluang untuk tidak patuh dan tingkat pendapatan. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut, sangatlah menarik untuk ditelisik lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang dan setelah adanya fenomena perubahan regulasi tersebut. Oleh

karena itu diperlukan analisis melalui pertanyaan penelitian dalam membahas rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendasari kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang?

Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh variabel *gender* terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- b. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- c. Bagaimana pengaruh variabel efektivitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- d. Bagaimana pengaruh variabel kemungkinan deteksi dan pinalti terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- e. Bagaimana pengaruh variabel tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- f. Bagaimana pengaruh variabel keadilan sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- g. Bagaimana pengaruh variabel pengaruh teman komunitas bisnis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- h. Bagaimana pengaruh variabel kecerdasan emosional terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- i. Bagaimana pengaruh variabel norma sosial terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

- j. Bagaimana pengaruh variabel nilai etis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- k. Bagaimana pengaruh variabel peluang untuk tidak patuh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
- l. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendapatan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh variabel *gender* terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
2. Untuk melihat pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
3. Untuk melihat pengaruh variabel efektivitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
4. Untuk melihat pengaruh variabel kemungkinan deteksi dan pinalti terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
5. Untuk melihat pengaruh variabel tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
6. Untuk melihat pengaruh variabel keadilan sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
7. Untuk melihat pengaruh variabel pengaruh teman komunitas bisnis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
8. Untuk melihat pengaruh variabel kecerdasan emosional terhadap tingkat pajak kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang

9. Untuk melihat pengaruh variabel norma sosial terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
10. Untuk melihat pengaruh variabel nilai etis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
11. Untuk melihat pengaruh peluang untuk tidak patuh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
12. Untuk melihat pengaruh variabel tingkat pendapatan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi, pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak UMKM terkait kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian serta rumusan masalah terkait penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa

gambar dan tabel pendukung dalam menjelaskan latar belakang. Selain itu, pada bab ini berisikan uraian tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan terkait penelitian ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang dipakai terkait penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak dan kerangka pemikiran yang digunakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan penjelasan terkait kondisi demografi daerah yang diteliti, karakteristik responden dan hasil interpretasi data dari penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.